

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota DPRD Kota Solok dan uraian permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Kota Solok periode 2021 diketahui mempunyai 13 tugas pengawasan sesuai dengan Perwako Nomor 2 tahun 2020 Kota Solok,
2. Mengenai rancangan, pembahasan, dan pengesahan APBD untuk periode 2021 di lakukan rapat bersama seluruh anggota DPRD Kota Solok bersama Pemda Kota Solok dari tanggal 16 sampai dengan 22 November 2020.
3. Mengenai rapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Rapat pembahasan KUA perubahan APBD Kota Solok tahun anggaran 2021 dan pagu alokasi anggaran OPD oleh badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.
  - 2) Masing-masing OPD memaparkan realokasi dan rasionalisasi anggarannya yang kemudian dimasukan dalam usulan pembahasan KUA dan PPAS perubahan antara Badan

Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.

Mengenai APBD Perubahan periode 2021 di tetapkan pada tanggal 28 oktober 2021.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD yaitu sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi, dikarenakan terjadinya pandemi *Covid 19* membuat sulitnya mengumpulkan data dan informasi terlebih jika terdapat masalah pada operasional yang dilakukan oleh pemda.
- b. Adanya keterbatasan dalam akses dan aktifitas dikarenakan adanya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).
- c. Dengan adanya pandemi *Covid 19* mengakibatkan pergeseran anggaran/*Refocusing* anggaran, dan sumber daya ke bidang-bidang yang lebih mendesak menjadikan pengawasan program dan proyek lainnya yang telah berjalan melemah.

5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD yaitu:

- a. Membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih baik antara Legislatif dan Eksekutif di daerah agar terciptanya transparansi dan

efisiensi dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD di periode 2021.

- b. Pengoptimalan teknologi dalam melakukan pengawasan baik melakukan rapat maupun pengawasan di lapangan.
- c. DPRD Kota Solok tetap melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan masyarakat dengan membatasi jumlah orang dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas:

1. Diharapkan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Solok agar bisa lebih bekerja sama lagi antar Eksekutif dan Legislatif terutama jika daerah dalam keadaan darurat seperti pandemi *Covid 19* yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
2. Diharapkan DPRD Kota Solok juga lebih mengantisipasi agar fungsi pengawasan terhadap APBD periode 2021 maupun periode-periode seterusnya tidak melemah dan lebih optimal, agar pengeluaran APBD berjalan sesuai kebutuhan masyarakat daerah.